

Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Verra Rosyalia Widia Sofyan – Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya

ABSTRACT

This study aims determine and analyze the effect of regional original income, general allocation funds, special allocation funds, and result share funds on human development index (HDI). The companies as for the samples, regencies and cities in West Java Province have budget realization reports every year for the 2014-2020 period and meet the requirements to be a sample of 23 consisting of regencies and 8 cities in West Java Province. The analytical method used is panel data regression. The sampling technique was carried out by purposive sampling method. The results of the study show that simultaneously local revenue, general allocation funds, special allocation fund and profit sharing funds have a significant effect on the human development index. While partially local revenue ha significant effect on the human development index, general allocation funds have significant effect on the human development index, special allocation funds have a significant effect on the human development index and profit sharing fund have a negative effect on the human development index.

Keywords: PAD, DAU, DAK, DBH

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun sebagai salah satu dari indikator alternative, selain pendapatan nasional perkapita untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara. Sejak dirubahnya system pemerintahan di Indonesia yang pada awalnya menganut system sentralisasi menjadi system desentralisasi atau dikenal dengan sebutan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah memberi wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Terdapat tiga indicator terpenting yang dijadikan tolak ukur untuk Menyusun IPM. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama hidup penduduk atau angka harapan hidup di suatu Negara. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata

tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca dan rata-rata tahun sekolah. Ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah di sesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap Negara.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori sesuai pada tabel. Setelah di rata-rata selama tiga tahun terakhir diperoleh bahwa Kota Bandung dengan rata-rata 80.04, mendapatkan kategori sangat tinggi. Kabupaten Bandung mendapatkan rata-rata 70.59 persen, Kabupaten Bekasi mendapatkan rata-rata 71.88 persen, Kota Bogor mendapatkan rata-rata 74.44 persen, Kota Sukabumi mendapatkan rata-rata 72.40 persen, Kota Cirebon mendapatkan rata-rata 73.68 persen, Kota Cimahi mendapatkan rata-rata 76.69 persen, Kota Tasikmalaya mendapatkan rata-rata 70.69 persen dan Kota Banjar mendapatkan rata-rata 70.06 persen, mendapatkan kategori Tinggi. Sedangkan sisanya 16 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Jawa Barat masuk pada kategori sedang.

Fenomena yang terjadi yaitu rata-rata Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2015-2017. Kota Bandung mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi dengan angka 80.04 persen, hal tersebut dapat di klasifikasikan masuk kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tinggi, tetapi masih banyak Kabupaten dan Kota yang Indeks Pemabngunan Manusia (IPM) nya masih dibawah angka 80.04 persen. Hal ini mencerminkan penerimaan yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang maksimal difungsikan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik serta dimanfaatkan untuk anggaran yang produktif dan dapat dirasakan oleh masyarakat seperti sector kesehatan, pendidikan dan infrastuktur sehingga Indeks Pembangunann Manusia (IPM) dapat meningkat. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pemerintah daerah Kabupaten/Kota menggunakan pendapatan daerahnya untuk belanja pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (DAU)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah (Baldric Siregar, 2015; Fery, 2021; Chabib Sholeh dan Rochmansjah, 2010), selain itu juga penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari hasil galian potensi keuangan yang ada di daerah tersebut, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan dalam proses pemerataan pembangunan bagi masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut (Abdul Halim, 2014) Dana Alokasi Umum yaitu transfer dana yang bersifat “*block grant*” yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia formula Dana Alokasi Umum (DAU) menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut (Halim, 2014) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (Darise, 2009) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Kementerian Keuangan, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Rudy Badrudin, 2012) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Berdasarkan beberapa pendapat tentang Dana Bagi Hasil (DBH) maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu “proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk” (*Human Development Report*, 2001) dalam arti bahwa manusia diberi pilihan yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang menyangkut ekonomi, social dan budaya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Sebagai ukuran kualitas

hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Secara Parsial di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2020

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan *Eviews 11* (Lampiran 8) dengan analisis regresi data panel model *fixed effect*, diperoleh nilai t_{hitung} 2.76478 > 2.10092 t_{tabel} ($df=(n-k)$; $df=18$) kemudian berdasarkan nilai signifikansi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0996 dan lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0000 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan daerah. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia, yaitu sebesar 0.414356, artinya dengan asumsi-asumsi dana alokasi umum (X_2), dana alokasi khusus (X_3) dan dana bagi hasil (X_4) tetap, maka setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 satuan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.414356.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Putu Gde Mahendra, Lilis Setyowati, Anim Rahmawaty (2018) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Zul Fadly (2016) dan Gede Ferdi Williantara dan I Gusti Ayu (2016) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh negative terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Secara Parsial di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2020

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan *Eviews 11* (Lampiran 8) dengan analisis regresi data panel model *fixed effect*, diperoleh nilai t_{hitung} 2.853104 > 2.10092 t_{tabel} ($df=(n-k)$; $df=18$) kemudian berdasarkan nilai signifikansi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0010 dan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0010 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia, yaitu sebesar 0.316400, artinya dengan asumsi-asumsi pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi khusus (X_3) dan dana bagi hasil (X_4) tetap, maka setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 satuan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.316400.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Riva, Puji Lestari, Ryan dan Zul Fadly (2016) yang menyimpulkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Secara Parsial di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2020

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan *Eviews 11* (Lampiran 8) dengan analisis regresi data panel model *fixed effect*, diperoleh nilai t_{hitung} 3.007409 > 2.10092 t_{tabel} ($df=(n-k)$; $df=18$) kemudian berdasarkan nilai signifikansi diperoleh

nilai probabilitas sebesar 0.0034 dan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.0034 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan daerah. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia, yaitu sebesar 0.705920, artinya dengan asumsi-asumsi pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi umum (X_2) dan dana bagi hasil (X_4) tetap, maka setiap peningkatan dana alokasi khusus sebesar 1 satuan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.705920.

Dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang positif terhadap indeks pembangunan manusia. Ini menunjukkan adanya peningkatan dari segi kuantitas (fisik, bangunan) dan juga dari kualitas hidup manusia yang sesuai dengan tujuan diperuntukannya dana alokasi khusus untuk peningkatan sarana dan prasarana. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Zul Fadly, Puji, Putu Gde, Ryan (2016) yang menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Secara Parsial di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2020

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan Eviews 11 (Lampiran 8) dengan analisis regresi data panel model *fixed effect*, diperoleh nilai $t_{hitung} - 1.656545 < 2.10092 t_{tabel}$ ($df=(n-k);df=18$) kemudian berdasarkan nilai signifikansi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.5120 dan lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.5120 > 0.05$) sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan daerah. Sedangkan koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia, yaitu sebesar -0.333635, artinya dengan asumsi-asumsi pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi umum (X_2) dan dana alokasi khusus (X_3) tetap, maka setiap peningkatan dana bagi hasil sebesar 1 satuan akan maka indeks pembangunan manusia akan menurun sebesar 0.333635.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Ubar Harahap, Gede Ferdi, dan Budi Sinulingga (2016) yang menyimpulkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2020

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *software eviews11 fixed effect*, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.959931 atau 95,99% yang artinya menunjukkan besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan sisanya 4,01% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil perhitungan menggunakan *software eviews11 fixed effect*, diperoleh nilai $F_{hitung} 134.8040 > 2,93 F_{tabel}$ ($df1=k-1=4; df2 = n-k= 18$) kemudian nilai probabilitas yaitu sebesar 0.000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0.000000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan pendapat Puji Lestari (2016) bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil

memiliki pengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan Lilis Setyowati (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat memiliki nilai cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat meningkat dari tahun ke tahun. Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat meningkat setiap tahunnya. Dana Bagi Hasil (DBH) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat memiliki nilai bervariasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dana Lokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Saran

Bagi pemerintah, karena faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari kekayaan asli daerah itu sendiri memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Maka, sebaiknya pemerintah mengamati pergerakan PAD tersebut agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah periode tahun dan jumlah observasi yang akan diteliti agar mendapat hasil penelitian yang lebih akurat, selain menambah variabel lainnya yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- BPS. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik 2016. *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2015*
- Chabib Sholeh & Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktur Menuju Tata Kekola Pemerintahan yang baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ke-2*. Jakarta: PT Indeks
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statisti BPS 2015
- Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisis Kedua*. Jakarta: PT. Indeks
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Fery, I. (2021). Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(1), 72-83.

- Frontalin, Febricia. 2020. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*. Volume 5 No. 1 e-ISSN: 2548-9925
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Haryanto. 2016. Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Study Awal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 9, No 2, Juli 2016 (111-124)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Dana Alokasi Umum
- Kesit, Bambang Prakoso. 2017. Pajak dan Retribusi, praktek-praktek internasional dan relevansinya dengan dunia ketiga. Edisi Revisi. Jakarta: UI-Press.
- Mahulete, Ummi. K. 2016. Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. *Jurnal* Vol 8, No 1 Juni 2016.
- Mardiasmo. 2018. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi
- Moh, Zulfikar. 2017. Analisis Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal of Regional Rural* Vol. 1 No. 2
- Mulyati, Sri. 2017. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Daerah pada Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 2, September 2017.
- Munandar, Aris. Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia. *Jurnal Ilmiah Ekonomo Global Masa Kini* Volume 8 Nomor 01 Juli 2017.
- Nurcholis, Hanif. 2007. Terori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo: Jakarta.
- Pitron, Decta Lugastoro. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Universitas Brawijaya.
- Putu Milan Pradnyantari. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada IPM dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.19.1. April (April): 536-564. ISSN: 2302-8556.
- Siahaan, P. mariohot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. gravindo Persada
- Sunarto dan Fatimah. 2016. Pengaruh penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul.
- Supriady, Deddy Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2002. Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia.
- UNDP. 2004. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York
- Ahmad, Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yani, Ahmad. 2004. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Garfindo Persada
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanto, Edi. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Katalogis*, 6(2).